

PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM KETAHANAN PANGAN DI DAERAH TERTINGGAL: Studi Kasus di Distrik Agimuga, Mimika, Papua¹

COMMUNITY CAPACITY BUILDING IN FOOD SECURITY AT THE REGION BEHIND: A Case Study in District Agimuga, Mimika, Papua¹

Agus Budi Purwanto²

Abstrak

Permasalahan masyarakat di daerah tertinggal Papua, yang menyangkut keterbatasan aspek infrastruktur wilayah kini merambah pada masalah ketersediaan pangan masyarakat. Penguatan Kapasitas Masyarakat Dalam Ketahanan Pangan yang didalamnya terkandung unsur pemberdayaan masyarakat perlu dikaji sebagai upaya penanganan masalah. Penelitian aksi ini dimaksudkan untuk memahami pola dan kondisi masyarakat dalam berketahanan pangan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam ketahanan pangan. Upaya penanganan melalui koordinasi, sinergi dan keterpaduan program dari berbagai instansi terkait khususnya yang ada Pemerintah Kabupaten Mimika, merupakan pendekatan yang ditempuh pada penelitian ini dan mendapatkan dukungan positif dari pemerintah daerah. Realisasi pelaksanaan pemberdayaan dari beberapa program di lokasi penelitian, ternyata dapat menumbuhkan dinamika masyarakat untuk maju dan berkembang dalam menjawab permasalahan yang dihadapinya. Persepsi masyarakat terhadap program pemberdayaan yang disikapi dengan pemahaman kerja dan upah merupakan salah satu kendala lapangan yang harus disikapi oleh berbagai pihak.

Kata-kata kunci: penguatan kapasitas, ketahanan pangan, daerah tertinggal, sinergi.

Abstract

Problems of the people in the remote areas of Papua, which concerns the limitations of the infrastructure in the area now reaching the food supply problem. Strengthening Community Capacity in Food Security that it contains elements of empowerment needs to be studies as a problem solution. The action research is intended to understand the patterns and conditions of resilient communities in food and increase the capacity of communities in food security. Efforts to tackle trough coordination, synergy and integration programs of various agencies, specifically at Mimika residence is the approach taken in this study and the positive support from the local government. Actual implementation of the empowerment of the few programs in the study sites, it could be grow a dynamic community to progress and develop in response to the problems. Community perception of empowerment program that addressed to understanding of work and wages is one of the field constraints that must be addressed by stakeholder.

Keywords: capacity building, food security, disadvantages areas, synergy.

¹ Makalah ditulis berdasarkan hasil penelitian “Penguatan Kapasitas Masyarakat Dalam Ketahanan Pangan: Studi Kasus Di Distrik Agimuga, Mimika, Papua” dari program Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa (IPKPP) Tahun 2012, Kerjasama Kementerian Sosial dengan Kementerian Ristek.

² Agus Budi Purwanto, Peneliti Muda di Puslitbang Kesos, Kementerian Sosial RI. Email: aguspurwanto5919@yahoo.com

PENDAHULUAN

Program pembangunan daerah tertinggal lebih difokuskan pada percepatan pembangunan di daerah yang kondisi sosial, budaya ekonomi, keuangan daerah aksesibilitas serta kesediaan infrastruktur masih tertinggal dibanding dengan daerah lainnya. Kondisi tersebut pada umumnya terdapat pada daerah yang secara geografis terisolir dan terpencil seperti perbatasan antar negara, daerah pulau-pulau kecil, daerah pedalaman, daerah rawan bencana serta daerah pasca konflik.

Pangan adalah kebutuhan pokok sekaligus menjadi esensi kehidupan manusia, karenanya hak atas pangan menjadi bagian sangat penting dari hak azasi manusia. Disamping itu ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional yang saat ini dinilai paling rapuh. Ditegaskan dalam Undang-undang Nomor: 7 tahun 1996 tentang Pangan yang dirumuskannya sebagai usaha mewujudkan ketersediaan pangan bagi seluruh rumah tangga, dalam jumlah yang cukup, mutu dan gizi yang layak, aman dikonsumsi, merata serta terjangkau oleh setiap individu. Memperhatikan definisi tersebut, saat ini ketahanan pangan belum dicapai pada seluruh rumah tangga walaupun pada tingkat nasional hasilnya telah lebih baik.

Masih banyak rumah tangga yang belum mampu mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, terutama dalam hal mutu dan tingkat gizinya. Dalam hal ini keaneka-ragaman pangan menjadi salah satu pilar utama dalam ketahanan pangan. Papua masih membutuhkan perhatian yang lebih, khususnya di bidang ketahanan pangan dan gizi. Kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi di setiap daerah, harus mendapat perhatian. (Bapenas, 2011).

Membangun ketahanan pangan berbasis agribisnis pangan rakyat perlu mendapatkan

perhatian serius. Pada tahun 1984 swasembada pangan pernah tercapai yang diukir sebagai prestasi gemilang saat itu, namun tahun-tahun selanjutnya semakin merosot sehingga upaya-upaya mempertahankan dan mencukupi kebutuhan pangan nasional semakin terancam. Seharusnya dibangun kembali kerangka pembangunan pertanian berkerakyatan dan berorientasi kemandirian dan kesejahteraan yang merata di dalam sistem agribisnis yang terpadu. Masalah penyediaan pangan untuk penduduk harus dipandang secara utuh, bukan sekedar dinilai secara untung rugi saja tetapi lebih jauh dicermati pada aspek politik, dan sosialnya karena di dalam pandangan nasional ketahanan pangan harus merupakan bagian dari ketahanan nasional.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: memahami pola dan kondisi masyarakat dalam berketahanan pangan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam ketahanan pangan.

Permasalahan, Ketahanan pangan merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan anggota keluarga dari waktu ke waktu yang berkelanjutan agar dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara produktif, yang jumlah, mutu dan ragamnya sesuai dengan lingkungan sosial budaya masyarakat tersebut berdomisili.

Dalam upaya mendukung program percepatan pembangunan di daerah tertinggal diperlukan suatu kegiatan pendalaman dan penyempurnaan kegiatan penanganan kemiskinan yang selama ini dilakukan. Upaya untuk mewujudkan kegiatan tersebut, penting dilakukan dengan penajaman program dalam penetapan sasaran, perencanaan, keterpaduan program, monitoring dan evaluasi. Kondisi tersebut merujuk pada pentingnya kegiatan pengembangan teknologi penanganan kemiskinan berbasis penelitian terkait dengan ketahanan pangannya.

Untuk melaksanakan upaya tersebut diperlukan sentuhan inovasi teknologi yang sesuai dengan kondisi setempat, yaitu secara teknis dapat diterapkan, secara sosial budaya dapat diterima, dan secara ekonomis menguntungkan. Inovasi tersebut meliputi varietas unggul bergizi tinggi, teknologi pascapanen terutama penyimpanan, serta teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan mengangkat citra pangan tradisional menjadi komoditas yang bergengsi, menarik disajikan, serta enak dan praktis dikonsumsi.

Untuk mencapai kondisi tersebut pertanyaannya adalah: (a) Bagaimana kondisi ketahanan pangan masyarakat yang ada sekarang ini? (b) Upaya apa saja yang dapat dilakukan masyarakat (sasaran penelitian) untuk memberdayakan dirinya dalam upaya berketahanan pangan? (= teknologi penanganan kemiskinan melalui ketahanan pangan yang dapat dikembangkan) dan (c) Kondisi apa saja yang dapat mendukung keberhasilan atau kegagalan dari perlakuan yang dikembangkan? (faktor-faktor yang mempengaruhi derajat ketahanan pangan rumah tangga)

Secara metodologis, lokasi penelitian dipilih Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika, Papua. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive yaitu daerah yang termasuk karakteristik daerah tertinggal.

Bentuk Penelitian deskriptif dengan pendekatan *Participatory Action Research*, yakni pendekatan dimana masyarakat untuk secara bersama-sama menganalisis masalah yang ada dalam kehidupannya, merumuskan rencana kegiatan dan memecahkan permasalahan yang ada secara nyata.

Pengumpulan Data menggunakan tiga instrumen kualitatif yaitu: wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (*focus*

group discussions - FGD), dan wawancara informal, observasi partisipatif untuk mengumpulkan dua jenis data (data kasus dan data umum). Didukung data sekunder dan studi dokumentasi khususnya yang terkait masalah kemiskinan di daerah setempat. Wawancara dilakukan dengan pengurus kampung, pengurus kelompok tani, aparat pemerintah distrik. FGD dilakukan dengan anggota kelompok tani, pendamping/ Penyuluh Pertanian, aparat pemerintah distrik, dinas terkait.

Sasaran Penelitian adalah warga masyarakat petani di Distrik Agimuga (Kampung Aramsolki, Amungun dan Killiarma) dengan pendekatan kelompok secara partisipatif. Kelompok yang dimaksud adalah kelompok tani yang telah ada yang tumbuh dari, oleh dan untuk kepentingan para petani sendiri. Dengan berkelompok, diharapkan tumbuh kekuatan gerak dari para warga dengan prinsip keserasian, dan kepemimpinan dari mereka sendiri.

Secara Konseptual, Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Masing-masing subsistem terkandung fungsi yang saling berkaitan. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Sedangkan subsistem konsumsi berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman jenis pangan, kandungan gizi, keamanan dan kehalalannya. Sementara dalam kenyataan kondisi ketahanan pangan di negara kita secara umum masih

memprihatinkan. Kondisi demikian diperkuat oleh hasil penelitian sosial ekonomi pertanian di Yogyakarta (Kepala Badan Ketahanan Pangan: Achmad Suryana, 2011), sekitar 13 persen dari jumlah total penduduk Indonesia masih mengalami rawan pangan. "Meskipun secara nasional sudah tercapai swasembada, masih terdapat kasus kerawanan pangan di sejumlah daerah," katanya pada seminar Hasil Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, di Yogyakarta. Jumlah penduduk rawan pangan (tingkat konsumsi < 90% dari rekomendasi 2.000 kkal/kap/hari) dan sangat rawan pangan (tingkat konsumsi <70 % dari rekomendasi) masih cukup besar (Ali Khomsan, dalam Opini:2010).

Wilayah Papua yang oleh khalayak juga dikenal Bumi Cenderawasih memiliki dan menyimpan potensi sumber alam yang berlimpah, termasuk potensi pangan lokalnya yang terdiri dari beberapa jenis seperti ubi jalar, talas, gembili, sagu dan jawawut yang menjadi bahan makanan utama bagi masyarakat Papua. Namun demikian Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua mengatakan bahwa Dewan Ketahanan Pangan Nasional bahkan dunia, menyoroti Papua termasuk kategori daerah rawan pangan. Menyimak pernyataan tersebut secara umum kondisi demikian dipengaruhi oleh berbagai faktor menyangkut kualitas kemampuan sumber daya manusia maupun infrastruktur pendukung yang masih sangat terbatas.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan di daerah ini, menjadi bagian dari tanggungjawab pemerintah daerah maupun pusat dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan keluarga guna terpenuhinya kebutuhan gizi anak dan keluarga. Dengan demikian kebutuhan pangan yang selama ini masih banyak tergantung persediaan/suplay dari luar Papua akan segera teratasi.

Menyimak Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang pangan, Pembangunan Ketahanan Pangan, bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan pangan bagi seluruh rumah tangga, dalam jumlah yang cukup, mutu dan gizi yang layak, aman dikonsumsi, merata serta terjangkau oleh setiap individu. Untuk menjamin keberlanjutan makna yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut tentunya kebijakan untuk mengimplementasikan dalam bentuk program harus mengacu pada potensi wilayah, sosial budaya dan sumber daya lokal dimana program ketahanan pangan tersebut dilakukan.

Memahami bahwa Indonesia merupakan negara agraris, maka membangun ketahanan pangan berbasis agribisnis pangan rakyat di Indonesia perlu mendapatkan perhatian serius. Sejarah mencatat pada era tahun 1980-an swasembada pangan pernah tercapai dan terukir sebagai prestasi gemilang saat itu, namun tahun-tahun selanjutnya semakin merosot bahkan terjebak dalam kelangkaan pangan. Kondisi terancamnya ketersediaan pangan nasional menjadi masalah besar khususnya bagi masyarakat sehingga impor pangan menjadi solusi. Bustanul Arifin (2005) mengatakan bahwa ketahanan pangan merupakan tantangan yang mendapatkan prioritas untuk mencapai kesejahteraan bangsa pada abad milenium ini.

Berangkat dari wawasan itu berarti masalah pangan harus diposisikan sebagai kepentingan rakyat, bangsa dan negara serta rasa nasionalisme. Dengan demikian melindungi, mencintai, meningkatkan kuantitas maupun kualitas maupun keberdayaan produksi pangan lokal harus secara terus menerus dikembangkan.

Pada dasarnya pembangunan ketahanan pangan adalah merupakan pemberdayaan masyarakat, yang berarti meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan ketersediaan,

distribusi dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu.

Dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem ketahanan pangan, kiranya perlu dibangun kerja sama yang sinergis dan terarah antar institusi dan komponen masyarakat. Program pengembangan ketahanan pangan yang akan dilaksanakan harus direncanakan bersama masyarakat yang mengetahui secara persis akan kebutuhan dan potensi yang ada di lingkungannya. Keberhasilan pemantapan ketahanan pangan akan ditentukan dari keseriusan kinerja dari berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan program dan perlu diperhatikan antara lain: a) Kondisi ekonomi, sosial, politik dan keamanan; b) Pelayanan prasarana publik bidang transportasi, perhubungan, telekomunikasi dan permodalan, c) Pelayanan kesehatan dan pendidikan, d) Pengembangan teknologi, perlindungan dan e) Kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan (www.deptan.go.id/daerah_new/banten).

Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dapat ditempuh melalui beberapa pendekatan, antara lain: Pengembangan kapasitas untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, Penyediaan fasilitas kepada masyarakat, revitalisasi kelembagaan dan sistem ketahanan pangan masyarakat.

Dalam rangka pengembangan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan dan pengembangan teknologi yang berdasarkan spesifikasi daerah yang mempunyai keunggulan dalam kesesuaian dengan ekosistem setempat dan memanfaatkan input yang tersedia di lokasi serta memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Penyediaan fasilitas kepada masyarakat tidak terbatas pengadaan sarana produksi, namun juga sarana pengembangan agribisnis lain yang diperlukan seperti informasi pasar, peningkatan akses terhadap pasar, penyediaan modal usaha dan membuka kerjasama dengan mitra usaha lain. Dengan demikian lebih menjamin bahwa masyarakat tidak hanya memproduksi pangan, namun mendapatkan keuntungan dari usahanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Revitalisasi kelembagaan dan sistem ketahanan pangan masyarakat dimaksudkan untuk pengembangan lumbung pangan sebagai upaya untuk menampung hasil dalam jangka waktu tertentu dan pemanfaatan potensi bahan pangan lokal serta peningkatan spesifikasi berdasarkan budaya lokal sesuai dengan perkembangan selera masyarakat yang dinamis.

Pemberdayaan petani untuk mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani seperti diuraikan diatas, hanya dapat dilakukan dengan mensinergikan semua unsur terkait dengan pembangunan pertanian. Untuk koordinasi antara instansi pemerintah dan masyarakat intensitasnya perlu ditingkatkan. (Agus M Tauchid S, www.deptan.go.id)

1. Pembangunan Ketahanan Pangan

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan dalam bidang ketahanan pangan tidak dapat dielakkan berbagai kebutuhan dalam pelaksanaan program dimaksud. Kebijakan pemerintah yang berpihak pada semua unsur yang terlibat dalam pembangunan tersebut sangat diperlukan. Masyarakat sebagai produsen sekaligus konsumen pangan, perlu mendapatkan jaminan yang pasti guna keberlangsungan dan keberhasilan ketahanan pangan. Sebagaimana amanat

dalam Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1996 tentang pangan, seperti terurai pada subab sebelumnya, ketahanan pangan diwujudkan bersama oleh masyarakat dan pemerintah dan dikembangkan mulai tingkat rumah tangga. Dengan demikian apabila setiap rumah tangga Indonesia sudah tersentuh program itu dan mencapai tahapan ketahanan pangan yang memadai, maka secara otomatis ketahanan pangan masyarakat, daerah dan nasional akan tercapai.

Oleh karena itu, arah pengembangan ketahanan pangan harus berawal dari rumah tangga, masyarakat, daerah dan kemandirian nasional. Dengan demikian karena fokus sasarannya adalah rumah tangga, maka yang menjadi kegiatan prioritas dalam pembangunan ketahanan pangan adalah pemberdayaan masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pemberdayaan masyarakat tersebut diupayakan melalui peningkatan kapasitas SDM agar dapat secara bersaing memasuki pasar tenaga kerja dan kesempatan berusaha yang dapat menciptakan dan meningkatkan pendapatan rumah tangga dan pada akhirnya akan terwujud kesejahteraan hidup warga masyarakat.

2. *Penguatan Kapasitas dalam Pemberdayaan*

Secara tersirat pemberdayaan memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang dilandasi dengan penerapan aspek demokratis, partisipasi dengan titik fokusnya pada lokalitas, sebab masyarakat akan merasa siap diberdayakan melalui issue-issue lokal, seperti yang dinyatakan oleh Gunawan Sumodiningrat, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan

dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat tersebut dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu; *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok

dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. *Ketiga*, memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian/*charity*. (Gunawan Sumodiningrat, www.docstoc.com/docs/)

Terkait dengan penguatan kapasitas masyarakat dalam pemberdayaan ini, yang disoroti adalah: akses informasi, teknologi baru, keterampilan dan pengetahuan; Menganalisis situasi, Mengidentifikasi masalah yang dihadapi serta potensi yang dimiliki; Kapasitas menetapkan tujuan-tujuan; Merencanakan anggaran, Mengelola dan melaksanakan program atau proyek; Memonitor dan mengevaluasi; Mengorganisasikan dan memobilisasi sumberdaya; Membuat keputusan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan; Membangun kerjasama dan mengembangkan jejaring kegiatan; Mengatasi konflik; serta Mengembangkan kepercayaan diri. (Anwar Syarif, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peta Kondisi Lokasi Penelitian

a. Kondisi Wilayah

Secara geografis Distrik Agimuga terdiri dari 4 kampung (desa) yaitu: Kampung Aramsolki, Amungun, Kiliarma dan Fakafuku. Kampung Fakafuku, lokasinya terpisah oleh sungai dengan ketiga kampung lainnya. Luas wilayah Agimuga mencapai 1.772 KM², dan dihuni oleh 212 Kepala Keluarga atau 910 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk adalah 0,51 jiwa/Km². Distrik ini tidak memiliki akses yang memadai ke pusat kota Kabupaten Mimika di Timika, karena dibatasi kawasan kontrak karya PT. Freeport Indonesia yang membelah wilayah Kabupaten Mimika menjadi dua bagian dan kawasan Taman Nasional Lorentz. Sungai Mati yang melintas kampung banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana transportasi antar kampung bahkan sampai ke kota Timika. Potensi sungai selain ikannya ditangkap untuk konsumsi juga digunakan untuk kebutuhan air minum pada saat air tadah hujan terbatas.

Kapasitas sumber daya manusia masih rendah, rata-rata berpendidikan SD, sehingga berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat merespon pembaharuan. Mata pencaharian masyarakat hampir seluruhnya bertani, berburu. Hasil bercocok tanam seperti kangkung, bayam, singkong, kacang panjang, umbi-umbian, betatas, keladi, jagung dll, lebih banyak digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, mengingat untuk diperjual belikan ke ibukota kabupaten sangat membutuhkan biaya transportasi yang cukup mahal.

b. Pendidikan

Dengan segala keterbatasan infrastruktur

wilayah, di distrik ini tersedia lembaga pendidikan meliputi: Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar swasta yang dikelola Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katholik (YPPK) dan SMP Negeri di Kp. Kiliarma. Tenaga pengajar SD maupun SMP Negeri sangat kekurangan tenaga pengajar yang *standby* di lokasi, para guru lebih sering berada di kota kabupaten (Timika) sehingga proses belajar sering terbengkelai. Untuk melanjutkan ke SLA siswa harus ke kota kabupaten yang jauh.

Meskipun di setiap kampung sudah tersedia fasilitas pendidikan, namun banyak siswa tidak mampu melanjutkan sekolah/harus putus sekolah karena harus membantu orang tua bekerja dan atau terganggu pendidikannya karena guru-guru jarang ada di tempat untuk mengajar. Proses belajar hanya berlangsung efektif pada saat-saat menjelang ulangan semester atau ujian kenaikan kelas maupun ujian akhir. Dengan kondisi demikian warga/orang tua siswa mengatakan "*Kalau guru hanya datang mengajar pada saat anak-anak ulangan/ujian, bagaimana anak-anak bisa mengerjakan soal ujian dengan baik kalau tidak pernah diajarkan sebelumnya*". Hal inilah yang menyebabkan rendahnya hasil pendidikan anak dan motivasi orang tua menyekolahkan anaknya.

c. Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang tersedia adalah Puskesmas dengan tenaga kesehatan terdiri dari: 1 orang dokter, 2 orang perawat, 2 orang bidan, dan dibantu kader-kader kesehatan. Di setiap kampung tersedia Puskesmas Pembantu (Pustu) dilengkapi seorang petugas kesehatan. Dalam berbagai kasus darurat di Pustu, perawat Pustu akan datang melapor dan berkonsultasi pada dokter yang ada di Puskesmas dan

bilamana diperlukan dokter akan datang ke Pustu. Menurut petugas kesehatan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan masih rendah, meski penyuluhan dan informasi tentang hidup sehat sudah sering dilakukan. Penggunaan air sungai untuk konsumsi rumah tangga masih banyak dilakukan terutama pada saat air (hujan) sudah berkurang. Kesadaran akan sanitasi juga masih terbatas, sehingga penyakit diare kerap terjadi pada anak-anak.

Jenis penyakit yang banyak diderita penduduk adalah Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) pada anak-anak maupun orang dewasa, malaria tropica. Hasil pemeriksaan darah kepada masyarakat yang dilakukan Dinas Kesehatan akhir tahun 2010, terdapat warga yang terindikasi terjangkit virus HIV/AIDS sebanyak 6 orang, 4 orang telah "meninggal" pada tahun 2011, demikian menurut sumber dari Puskesmas Kecamatan. Hasil demikian belum disampaikan kepada penderita dan keluarganya dengan alasan masih mencari pendekatan yang tepat agar penderita tidak dikucilkan oleh keluarganya maupun masyarakat. Untuk sementara kepada penderita diberikan pelayanan khusus dan diberikan penjelasan untuk melakukan hubungan seksual dengan menggunakan alat kontrasepsi (kondom).

Saat ini Puskesmas memiliki kendaraan operasional motor roda tiga (Dorkas) dan perahu (*speedboat*) untuk membawa pasien ke rumah sakit rujukan di ibukota kabupaten.

d. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Permasalahan sosial yang banyak dihadapi masyarakat, teridentifikasi sebagai berikut:

Masih banyak ditemui Rumah Tidak Layak Huni, (RTLH) dengan rumah panggung/berdinding kayu lapuk/beratap bocor (169

keluarga); Keluarga Fakir Miskin/KFM (159 keluarga); Wanita Rawan Sosial Ekonomi/WRSE cukup menonjol (44 orang); Lanjut Usia tidak produktif (37 orang); Anak Terlantar (9 orang); Penyandang Cacat (9 orang). Warga korban bencana/banjir mencapai (43 rumah) terutama di Kp. Fakafuku yang merupakan daerah rawan bencana. Sungai Cemara yang mengalir di tengah kampung sering meluap dan sisi-sisi sungai sering longsor (abrasi air sungai), yang berakibat banjir terutama saat hujan turun terus menerus.

e. Sumber Daya

Sumber daya alam, Distrik Agimuga, memiliki lahan subur dimana segala tanaman dapat tumbuh, sedangkan untuk kampung Kiliarma yang terletak di dataran rendah dari dua kampung lainnya, hanya tanaman tertentu yang dapat tumbuh (seperti umbi-umbian, ketela dan keladi). Dataran di tiga kampung lainnya dapat dimanfaatkan untuk menanam padi yang tumbuh subur. Pada tahun 2010 pernah dilakukan program penanaman padi. Melalui program dimaksud masyarakat diberi bantuan alat pertanian dan mesin penggilingan padi. Namun terbatasnya pendampingan dan minimnya alat untuk menggarap lahan, menjadikan program tersebut belum nampak hasil yang memadai

Sumber daya manusia, bila dilihat dari latar pendidikan masih tergolong rendah, mengingat sebagian besar masyarakat berpendidikan SD. Dari segi keterampilan yang dimiliki warga sebenarnya cukup potensial, misalnya pertanian, keterampilan anyaman (noken/tas khas Papua) yang biasa digunakan para ibu maupun bapak. Pada umumnya para ibu memiliki keterampilan ini dan menjadi kegiatan sampingan, namun dari hasil keterampilan tersebut menurut

warga, kendala yang dihadapi adalah pemasaran hasil usaha mereka.

f. Perekonomian Masyarakat

Mata pencaharian pokok warga distrik Agimuga yaitu bertani ladang, ubi-ubian, kacang dan padi (bagi sebagian masyarakat). Lahan garapan mereka berada di hutan yang jauh dari lokasi permukiman penduduk. Dalam hal bercocok tanam padi baru sebagian kecil masyarakat yang melakukannya karena bertani padi bagi masyarakat masih merupakan hal yang baru dan mereka belum mendapatkan bimbingan teknis yang memadai dari Penyuluh Pertanian yang ada di distrik. Dengan demikian beras masih harus terus dibeli oleh masyarakat dengan harga yang cukup mahal.

Dalam hal proses produksi pengelolaan dan pengolahan lahan, jenis tanaman yang selama ini digarap warga adalah kacang tanah, kacang kedelai, ketela dan palawija. Untuk pengolahan dan penanaman bibit awalnya warga mendapat penyuluhan dari PPL Pertanian, namun penyuluhan tersebut dirasakan warga hanya sekedar penyuluhan saja. Pendampingan terhadap aktivitas para petani selama musim tanam tidak pernah dilakukan oleh petugas PPL, sehingga pengelolaan dan pengolahan lahan tanaman sangat tidak optimal.

Pola sistim tanam selama ini masih mengandalkan air musim hujan/tadah hujan kecuali untuk lahan-lahan yang dekat dengan aliran sungai. Saat ini sistim pengairan irigasi sedang dirintis oleh pemerintah yang diawali dengan survei-survei lokasi. Distribusi dan pemasaran hasil panenpun menjadi permasalahan tersendiri bagi petani sehingga hasil panen lebih banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan

sehari-hari keluarga sendiri. Selain itu di distrik Agimuga juga belum terbangun pasar, sehingga sirkulasi perekonomian baru sebatas antar warga dilingkungannya.

Untuk memenuhi kebutuhan fisik (dalam hal ini makanan sehari-hari) bagi anggota keluarga, menu makanan bagi mayoritas masyarakat, belum dapat memenuhi kebutuhan 4 sehat 5 sempurna. Bahan-bahan pokok konsumsi sehari-hari lebih banyak berasal dari hasil panen sendiri seperti: ketela, ubi hutan, sayuran dll. Ketergantungan yang tinggi terhadap konsumsi beras mengalahkan bahan makanan utama lokal seperti umbi-umbian, menyebabkan warga harus membeli beras yang didatangkan dari Timika. Biaya transportasi yang tinggi menuju Timika, secara langsung berdampak pada tingginya harga beras (mencapai harga Rp. 350.000,- s/d Rp. 400.000,- per karung isi 20 Kg) melebihi daya beli masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu permasalahan utama di Distrik Agimuga. Lauk pauk seperti telur, ikan asin dapat diperoleh di kios-kios kampung. Untuk dapat menikmati lauk pauk berupa telur ayam harus mengeluarkan uang senilai Rp. 1500,- per butir, itupun jarang ada dijual. Kondisi demikian yang sangat dirasakan berat oleh sebagian besar warga untuk memenuhi kebutuhan sehat bagi keluarganya.

g. Program Pembangunan Yang Pernah Dilakukan

Program-program pembangunan dari berbagai institusi pemerintah maupun swasta yang pernah dilaksanakan di Distrik Agimuga antara lain adalah:

1) Pengerasan jalan dari Kiliarma hingga Aramsolki sepanjang kurang lebih 24 KM (Dinas PU dana APBD).

2) Program revitalisasi pengembangan padi sawah (tahun 2008) ditambah dengan bantuan alat-alat pertanian, hand tractor dan penggilingan padi (Dinas Pertanian); Pelatihan bertanam padi dari LSM AMARTA di kampung Aramsolki bekerja sama dengan AusAids.

3) Pembangunan rumah *Eme Neme Yauware* (ENY) yang direncanakan bagi warga di tiap kampung. Realisasi program ini tidak berlanjut karena terkendala oleh biaya angkut material bangunan yang mahal dan tidak ada koordinasi antara penyelenggara dan aparat pemerintah setempat. Sebagaimana diungkapkan oleh Sekda Kab. Timika bahwa: “program perbaikan rumah bagi keluarga tidak mampu dengan dana *Eme Neme Yauware* dirasakan belum berjalan secara optimal dan belum mampu menjangkau semua kampung”.

Dinsosnakertans pada tahun 2009 - 2010 di Distrik Agimuga, melakukan program pembangunan rumah sebanyak 85 unit di Kp. Aramsolki (15 unit); Kp. Fakafuku (25 unit); Kp. Amungun (30 unit) dan Kp. Kiliarma (15 unit).

4) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) berupa kegiatan: pengadaan makanan tambahan (PMT), keterampilan menjahit, memasak, anyaman, pemberian beasiswa murid SMA berprestasi, pembangunan jembatan kayu 1 unit dan pembangunan MCK di setiap kampung. Meski pada kenyataannya kegiatan keterampilan sering tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadirannya instruktur, sehingga bahan-bahan keterampilan (memasak) yang sudah disediakan terlebih dahulu menjadi busuk, dan akhirnya bahan-bahan tersebut dibuang.

h. Kebutuhan Masyarakat

Untuk mengatasi berbagai permasalahan

kehidupan sehari-hari yang telah dipetakan sendiri oleh masyarakat, maka saat ini masyarakat memerlukan beberapa kebutuhan mendasar, antara lain:

- 1) Ketersediaan bahan kebutuhan pokok yang kini mulai sulit diperoleh dan Bahan Bakar Minyak.
- 2) Bimbingan dan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sarana pertanian untuk meningkatkan produksi tanaman pangan.
- 3) Bantuan perumahan dengan memperhatikan kondisi rumah sehat dan melibatkan potensi lokal.
- 4) Keterampilan praktis dan bantuan modal usaha.
- 5) Penyuluhan kepada masyarakat tentang: pentingnya pendidikan, kesehatan keluarga dan lingkungan
- 6) Pembangunan sarana transportasi untuk memudahkan mobilitas dan pemasaran hasil usaha warga.

2. Penguatan Kapasitas (Pemberdayaan Masyarakat)

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penguatan kapasitas masyarakat melalui pendekatan kesejahteraan meliputi:

1. Persiapan; melakukan pemetaan sosial guna merevisi data kondisi potensi, kebutuhan dan permasalahan sosial yang telah dilakukan tahun 2011, di Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika. Selanjutnya menganalisa potensi, terkait dengan: kualitas kelompok/masyarakat, kelembagaan kelompok, rencana perlakuan dan kendala di masyarakat dan kelompok.
2. Penguatan Masyarakat; kegiatan penguatan kapasitas masyarakat mempunyai tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dan paham secara

utuh tentang kondisi lahan serta potensi-potensi yang ada di dalamnya sehingga muncul kesadaran untuk melakukan pengelolaan yang lebih baik. Disamping itu juga mengajak masyarakat/komunitas untuk bersama-sama melakukan pemetaan permasalahannya sehingga masyarakat mampu mengklasifikasikan permasalahan sesuai dengan kondisi yang ada dan kebutuhan mereka. Fokus Penguatan masyarakat, meliputi: Motivasi; Diskusi metode peningkatan kapasitas dan Rencana intervensi.

3. Mediasi kegiatan dengan instansi terkait di tingkat kabupaten, antara lain dengan: Kantor Ketahanan Pangan; Dinas Koperindag; Dinas Sosnakertrans; Dinas Peternakan, Tanaman Pangan dan Perkebunan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pekerjaan Umum dan; Lembaga Swadaya Masyarakat.
4. Rekrutmen tenaga lokal (kelompok) dengan kriteria: Memiliki kepedulian pada masyarakat; Memiliki komitmen dan tanggungjawab dan; Pernah menjadi anggota kelompok.
5. Strategi Peningkatan Kapasitas, meliputi: Bimbingan Teknis Bidang Koperasi dan perdagangan; Bimbingan Teknis Bidang Ketahanan Pangan; Bimbingan Teknis Bidang Peternakan, Tanaman Pangan dan Perkebunan; Bimbingan Teknis Bidang Sosial dan; Bimbingan Teknis Bidang Peternakan.
6. Tindak Lanjut Kegiatan, meliputi: Pendampingan; Monitoring; Evaluasi dan; Penelitian lanjutan.

a. Koordinasi Pemberdayaan

Untuk mencapai hasil optimal pada Penguatan Kapasitas Masyarakat Dalam Ketahanan Pangan Di Daerah Tertinggal (Distrik Agimuga), dipandang penting untuk dilakukan koordinasi dan dialog antar instansi terkait terutama yang berada di

pemerintah Kabupaten Mimika, termasuk dengan lembaga swadaya masyarakat dan akademisi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendiskusikan dan mencoba menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Upaya koordinasi antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemda Kabupaten Mimika dengan tim peneliti Puslitbang Kesos, Kementerian Sosial telah dilakukan dan difasilitasi oleh Sekretaris Daerah di Kantor Kabupaten Mimika (Jum'at, 4 Mei 2012). Dari pertemuan koordinasi menghasilkan beberapa komitmen dan perencanaan program dari masing-masing SKPD yang akan dilaksanakan secara terpadu di lokasi penelitian.

Pada pertemuan koordinasi melibatkan instansi: a) Dinas Peternakan, Tanaman Pangan dan Perkebunan, b) Dinas Koperindag, c) Dinas Pekerjaan Umum, d) Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, e) Dinas Perikanan dan Kelautan, f) Dinas Sosnakertrans, dihasilkan rencana program kegiatan terpadu dari beberapa instansi sebagai berikut:

1) Program Peternakan.

Dinas Peternakan, Tanaman Pangan & Perkebunan bekerjasama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMK) dan Universitas Papua (UNIPA), mencanangkan realisasi ternak sapi pada pemberdayaan masyarakat, sejumlah 200 ekor sapi untuk kelompok/masyarakat di 3 kampung atau sekitar 70 ekor sapi setiap kampung.

Dari segi anggaran, program ini didanai LPMK dari sumber dana alokasi 1% hasil PT. Freeport Indonesia yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat khususnya bagi suku

Amungme dan Kamoro di Timika. Program pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada. Dari segi teknis peternakan menjadi kewenangan Dinas Peternakan, Tanaman Pangan & Perkebunan.

2) Program Tanaman Pangan.

Terkait dengan masalah pangan masyarakat tertuang kegiatan:

- a) Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan: melakukan pembukaan areal pertanian dan budidaya tanaman pangan jenis Keladi, Betatas dan Pisang seluas 3 Ha (masing-masing jenis tanaman 1 Ha
- b) Dinas Peternakan, Tanaman Pangan dan Perkebunan: melakukan pengembangan lahan pertanian baru seluas 5 Ha; Revitalisasi pemanfaatan Mesin Giling Padi dan bantuan peralatan pertanian (cangkul dan parang).

3) Program Sarana Umum/Pendukung.

Dinas Pekerjaan Umum (PU): melakukan perbaikan Irigasi Pertanian sebagai tindak lanjut program tahun anggaran sebelumnya.

Konsep pelaksanaan pembangunan terpadu lintas instansi/SKPD sebagaimana yang digagas ini sebaiknya menjadi Strategi Nasional. Dengan pertimbangan karena anggaran di SKPD sangat terbatas. Strategi Nasional dimaksudkan bahwa penganggaran pembangunan berada di tingkat pusat/kementerian terkait dan daerah (SKPD) mensupport pendampingannya.

4) Program Koperasi.

Dinas Koperindag melakukan Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Koperasi dan Pemetaan Kawasan Industri Masyarakat.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarakat (terutama masalah ekonomi) maka diperlukan adanya upaya mengatasi masalah sendiri (masyarakat) secara bersama-sama, Sebenarnya Koperasi di Agimuga sudah mulai dibentuk, namun nampaknya belum berjalan sebagaimana harapan.

5) Program Sosial dan Permukiman.

Untuk tahun anggaran 2012 Dinas Sosnakertrans melakukan:

- a) Evaluasi pelaksanaan program-program pembangunan kesejahteraan sosial dan *up date* data permasalahan kesejahteraan sosial.
- b) Evaluasi Pembangunan Perumahan, sebagai bahan rumusan kebijakan program pembangunan perumahan sebanyak 200 unit pada tahun 2013 di Distrik Agimuga.

6) Program Perikanan.

Dinas Perikanan dan Kelautan melakukan Pelatihan Budidaya Perikanan dan Bantuan Paket Jaring yang difokuskan di Kampung Fakafuku.

b. Kesiapan Kelompok/Masyarakat

Persiapan-persiapan yang telah dilakukan masyarakat dari 3 Kampung (Kp. Aramsolki, Kp. Amungun dan Kp. Killiarma) antara lain adalah:

1) Bidang Peternakan

Menurut penanggungjawab program dari pihak LPMK (Bpk. Roy) program ini telah diawali kegiatan studi pendahuluan tentang berbagai hal terkait dengan ternak sapi yang dilakukan bekerjasama dengan pihak Universitas Papua (UNIPA) Manokwari. Dari hasil studi tersebut, maka untuk mewujudkan rencana tersebut terdapat beberapa

kegiatan yang harus dilakukan antara lain:

- a) Mensosialisasikan rencana program kepada masyarakat dan mendiskusikannya sekaligus untuk mengetahui respon masyarakat masyarakat.
- b) Penyiapan lahan seluas 10 Ha setiap kampung yang direncanakan untuk (lahan/ruang kandang, lahan/ruang tanam rumput makanan ternak, lahan/ruang pelatihan, lahan/ruang administrasi, lahan/ruang pemeriksaan/ perawatan, lahan/ruang pengembangan ternak, dll)
- c) Penanaman rumput (jenis raja dan gajah) sebagai persiapan makanan ternak.
- d) Penyiapan/pembuatan kandang ternak
- e) Pengenalan secara langsung peternakan sapi kepada masyarakat.

Beberapa kegiatan persiapan yang telah dilakukan hingga saat ini:

a) Oleh LPMK

- (1) Membuka wawasan dan memotivasi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi kepada warga masyarakat beserta para tokoh masyarakat/adat dari setiap kampung. Oleh karena itu seluruh warga masyarakat (setiap Kepala Keluarga) diminta untuk berperan aktif dalam kegiatan.
- (2) Melakukan “Studi Banding” ke Peternakan Sapi di Bali dan Nusa Tenggara Timur. Dari setiap kampung diwakili oleh 3 orang sebagai pioner, yang terdiri dari: Kp. Aramsolki : P. Stevanus, P. Yulius, P. Fransiscus; Kp. Amungun : P. Edo, P. Marianus, P. Johanis; Kp. Kiliarma : P. Julianus, P. Petrus, P. Pitalis

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman selama mengikuti studi banding, 9 orang tersebut mengatakan bahwa: (1) Ternak sapi di Distrik Agimuga akan sangat berkembang dengan alasan bahwa “rumput sebagai makanan ternak sangat melimpah dibandingkan dengan di Kupang NTT dan Bali. Sekarang tinggal bagaimana motivasi dan kemauan keras dari masyarakat untuk maju dan sejahtera” katanya; (2) Sebagian dari mereka mengatakan bahwa ternak sapi merupakan pengalaman baru, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk mencoba (meskipun mereka juga mengatakan bahwa para leluhurnya dahulu juga sebagai peternak sapi)

b) Oleh Kelompok/Masyarakat

- (1) Warga yang mengikuti Studi Banding telah melakukan sosialisasi hasil studi bandingnya kepada warga masyarakat di kampungnya masing-masing, sekaligus membahas langkah-langkah selanjutnya.
- (2) Penyiapan lahan yang ditargetkan 10 Ha, hingga saat ini rata-rata setiap kampung telah mencapai 4 Ha
- (3) Penanaman rumput di Kp. Aramsolki dan Kp. Amungun telah dilakukan sekitar 3 minggu yang lalu dan saat ini sudah nampak tumbuh subur. Untuk lahan di Kp. Killiarma belum melakukan penanaman rumput karena lahan sedang dalam proses pengerjaan/penebangan kayu.

Dalam proses persiapan pelaksanaan kegiatan ternak sapi, menurut pengurus kelompok dan beberapa warga masyarakat muncul berbagai permasalahan, seperti:

(1) Permasalahan Lahan

Penyiapan lahan seluas 10 Ha sebagaimana yang dipersyaratkan di

setiap Kampung, secara umum masing-masing kampung dihadapkan pada status lahan. Lahan yang saat ini telah dipersiapkan bukanlah merupakan lahan milik umum/kampung, namun merupakan hak ulayat warga masyarakat. Disisi lain lahan untuk peternakan merupakan kebutuhan utama dan harus segera ada disetiap kampung

(2) Permasalahan Partisipasi Masyarakat.

Peternakan Sapi di masing-masing kampung pada prinsipnya adalah diperuntukkan bagi seluruh warga kampung (kelompok kampung). Oleh karena itu mulai penyiapan lahan sampai dengan perawatan ternak, dituntut partisipasi seluruh warga masyarakat. Dalam kenyataan menurut para pengurus kelompok “*menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk bergotong-royong mempersiapkan lahan peternakan (penebangan kayu, pembersihan lahan, penanaman rumput ternyata bukanlah hal yang mudah*”.

Di masing-masing kampung, pada awal pengerjaan penyiapan lahan tidaklah banyak masyarakat yang peduli/aktif bergotong-royong menebang hutan: Kp. Aramsolki (14 orang dan saat ini menjadi 31 orang); Kp. Amungun (16 orang dan saat ini menjadi 23 orang) dan Kp. Kiliarma (9 orang dan saat ini menjadi 17 orang)

(3) Permasalahan Anggaran

Untuk biaya operasional penyiapan lahan ternak (penebangan kayu, penanaman rumput, pembuatan kandang dll), selama ini menggunakan partisipasi iuran warga kelompok. Pembelian minyak/bensin mesin potong kayu (Senzo), kopi dan konsumsi, dll semuanya berasal dari swadaya masyarakat.

Biaya persiapan yang akan diberikan

kepada setiap kampung sebanyak Rp. 25.000.000,- per kampung sampai dengan bulan Juni 2012 belum diterima oleh masyarakat.

Dengan kondisi anggaran yang demikian, maka persiapan kandang ternak di 3 kampung belum terealisasi. Masyarakat masih menunggu anggaran mengingat pembuatan kandang ternak sangat membutuhkan biaya yang sangat besar. Biaya yang dibutuhkan tersebut semata-mata untuk pembelian bahan kandang (seng/atap, paku, semen). Untuk keperluan kayu warga masyarakat rela untuk memanfaatkan kayu yang ada. Disisi lain pihak LPMK mensyaratkan adanya kandang sebelum sapi datang (direncanakan sapi akan datang bulan Oktober-November 2012).

Terkait dengan berbagai permasalahan tersebut pengurus kelompok disetiap kampung dan warga masyarakat mengharapkan beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Meskipun studi banding telah dilakukan, namun sebagian besar masyarakat menekankan perlunya pelatihan/ penyuluhan secara langsung dan kontinyu terkait dengan peternakan/ perawatan sapi bagi anggota kelompok/ masyarakat.
- (2) Diberikannya dukungan biaya untuk pembukaan lahan, pembuatan kandang dll, karena luasnya lahan yang akan digunakan dan medan yang cukup berat serta memerlukan waktu yang relatif lama. Dukungan biaya diharapkan dari Pemerintah Daerah maupun LPMK.
- (3) Pendampingan kegiatan hingga masyarakat benar-benar memahami peternakan sapi. Warga masyarakat sangat berharap agar pengalaman pendampingan pada program-program yang lalu tidak terulang lagi. Contoh:

a) Program pertanian/tanam padi hanya didampingi 4 - 5 hari selanjutnya warga ditinggalkan begitu saja, b) Pengolahan padi/mesin giling padi sejak awal dipasang tahun 2009 hingga kini tidak pernah beroperasi karena tidak ada warga masyarakat yang bisa mengoperasikan setelah ditinggalkan petugasnya saat itu.

- (4) Pendamping diharapkan bisa tinggal bersama masyarakat, sehingga dapat melakukan bimbingan maupun diskusi pada saat masyarakat menghadapi masalah/kendala terhadap program.
 - (5) Monitoring dan pendampingan program-program dari instansi pemerintah perlu dilakukan. Berbagai contoh kasus seperti: Program Ternak Kambing, Pertanian, Koperasi, Keterampilan/ PKK yang telah dilakukan, saat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- 2) Bidang Pertanian dan Tanaman Pangan
- Program tanaman pangan yang diprakarsai Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, dengan program penanaman pangan lokal. Pada TA. 2012 ini baru ditargetkan mencapai persiapan lahan seluas 3 Ha untuk penanaman Betatas (1 Ha), Keladi (1Ha) dan Pepaya (1 Ha). Pengembangan lahan tanaman pangan pada TA. 2013 direncanakan mencapai luas hingga 10 Ha. Kronologis terwujudnya program ketahanan pangan di Distrik Agimuga adalah sebagai berikut:
- a) Menurut Kepala Kantor KP&P Kabupaten Mimika, program pengembangan tanaman pangan dilatarbelakangi kondisi pangan masyarakat yang sudah sangat memprihatinkan. Saat ini masyarakat mulai sulit membeli beras karena mahal, sementara bahan pangan lokal seperti: Betatas, Keladi kurang dibudidayakan oleh masyarakat.

- b) Awal tahun 2012 Kepala Kantor KP&P menginformasikan rencana tersebut kepada beberapa orang masyarakat khususnya di Kp. Amungun (tidak diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat). Selanjutnya menyuruh beberapa orang Kp. Amungun untuk membat hutan sebagai persiapan lahan.
- c) Untuk memenuhi jumlah anggota kelompok, beberapa orang (sebagai pioner) menghubungi warga masyarakat lain yang dipandang mau bekerja.

Lahan yang dibuka/tebang untuk tanaman pangan berada di Kp. Killiarma, namun kelompok yang mengerjakan hanya warga masyarakat Kp. Amungun sebanyak 9 - 12 orang. Kegiatan ini menjadi pertanyaan warga masyarakat lainnya, antara lain:

- a) Bagi warga Kp. Amungun: beberapa warga dan tokoh masyarakat menyatakan bahwa sosialisasi program tanaman pangan tidak disampaikan secara terbuka, sehingga tidak banyak warga masyarakat Kp. Amungun yang mengetahui. Oleh karena itu nampaknya yang terlibat pada kegiatan tersebut antara 6 – 9 orang saja.
- b) Bagi warga Kp. Kiliarma dan Kp. Aramsolki: menurut pengurus kampung dan beberapa warga masyarakat terutama warga Kp. Kiliarma mengatakan bahwa kegiatan tersebut tidak pernah ada sosialisasi dan tidak melibatkan warga masyarakat Kp. Kiliarma. Apakah program tanaman pangan tersebut hanya untuk masyarakat Kp. Amungun atau untuk masyarakat Distrik Agimuga? Kejelasan tentang program/kegiatan ini perlu segera disampaikan kepada masyarakat secara umum agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari (kata aparat distrik Agimuga)

Pembukaan lahan yang telah siap tanam seluas sekitar 2 Ha dan 1 Ha masih dalam proses penyelesaian pengerjaan. Saat ini proses pengerjaan lahan terhenti karena tidak adanya dukungan anggaran. Masyarakat telah merasa capek karena mereka telah bekerja keras namun belum mendapatkan sedikitpun dukungan dari Kantor Ketahanan Pangan.

Dalam hal pelaksanaan program terdapat beberapa harapan warga sebagai berikut:

- a) Pola tanam (betatas, keladi dan pisang) sebagaimana yang direncanakan pada lahan yang dibuka agar segera dilakukan. Hal itu dimaksudkan agar rumput dan alang-alang tidak tumbuh subur kembali di lahan tersebut.
- b) Untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan pertanian, masyarakat sangat membutuhkan pembangunan sarana irigasi pertanian di setiap kampung.

3. Bidang Koperasi

Beberapa tahun yang lalu di Distrik Agimuga telah beroperasi Koperasi Berbadan Hukum (milik Yayasan Amarta) dan beberapa Embrio Koperasi yang diprakarsai oleh berbagai pihak (Amarta, Respek Mandiri maupun Pemerintah) yang dilengkapi dengan bangunan kios. Koperasi tersebut menyediakan kebutuhan pokok masyarakat (bahan makan) dan kebutuhan pertanian. Embrio Koperasi di kampung-kampung umumnya dikelola Ibu PKK dengan beberapa pengurus.

Saat ini keberadaan koperasi-koperasi tersebut pada umumnya sudah tidak berjalan lagi karena berbagai kendala (baik anggaran maupun manajemen pengelolaan). Kendala-kendala tersebut antara lain adalah:

Segi anggaran: (menyangkut mekanisme perputaran barang dan uang) tidak dapat berjalan lancar karena banyak

anggota masyarakat pengguna barang dan uang (peminjam) yang tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu dan jumlah, bahkan akhirnya lama kelamaan tidak mengembalikan.

Segi manajemen pengelolaan: pengurus koperasi pada umumnya kurang memiliki pengetahuan tentang pengelolaan koperasi. Menurut pengurus, pelatihan tentang perkoperasian kepada pengurus koperasi hanya diberikan sekilas pada saat awal pembukaan koperasi.

Untuk menunjang kelancaran dan keberlanjutan koperasi warga masyarakat berharap agar dilakukan:

- a) Penguatan kapasitas pengurus dan masyarakat tentang koperasi melalui pelatihan, penyuluhan dan pendampingan.
- b) Peningkatan kepedulian dari berbagai unsur, seperti:
 - (1) Dari pemerintah: adanya pengawasan dan pendampingan kepada koperasi, sehingga koperasi tidak berjalan seadanya saja
 - (2) Dari pengurus: adanya keseriusan pengurus dalam mengelola koperasi sehingga mampu berkembang memenuhi kebutuhan anggota.
 - (3) Dari masyarakat/anggota: adanya kesadaran terhadap hak dan kewajiban anggota

Dengan kondisi demikian diperlukan upaya penguatan kelembagaan koperasi dan tambahan modal koperasi, agar koperasi dapat berjalan kembali sejalan dengan penambahan pengetahuan/keterampilan pengurus serta kesadaran masyarakat/anggota.

c. Realisasi Program

- 1) Pelaksanaan Program Peternakan Sapi
Kegiatan yang telah dilaksanakan

masyarakat di Kp. Aramsolki, Kp. Amungun dan Kp. Killiarma hingga September 2012 adalah: pembukaan lahan rata-rata 200 M x 200 M dan penanaman rumput gajah sebagai makanan ternak yang saat ini telah mencapai ketinggian 50 Cm. Khusus lahan di Kp. Killiarma lahan yang telah dikerjakan ternyata lokasi tersebut harus dipindahkan karena tidak memenuhi persyaratan dan kini sedang dilakukan pengerjaan ulang.

Bersamaan dengan finalisasi pengerjaan lahan juga dilakukan pelatihan bagi masyarakat tentang teknologi berternak sapi. Materi peternakan disampaikan oleh mahasiswa UNIPA yang sedang melaksanakan KKN (berlaku sebagai pendamping).

Pembuatan kandang di tiga kampung belum dapat dilakukan karena masyarakat masih menunggu pengiriman bahan (seng, kayu) dari Timika/LPMAK. Bahan-bahan pembuatan kandang ternak yang tersedia di kampung, seperti: pasir, batu koral dan sebagian kayu kini sedang disiapkan oleh kelompok/masyarakat, namun hingga saat ini belum dilakukan dengan alasan masih musim hujan. Disisi lain masyarakat juga mengatakan bahwa “untuk mengumpulkan bahan pasir, batu koral bisa saja segera dilakukan jika telah diberikan dana/anggaran”. Untuk pembuatan kandang ternak masyarakat/kelompok menginginkan bahkan berharap untuk membuat kandang yang permanen sebagaimana peternakan sapi di Bali.

Pada awalnya masyarakat cukup antusias membuka lahan dan membentuk kelompok ternak. Masyarakat mulai bekerja membuka lahan untuk kandang dan rumput, dimana masyarakat menebang pohon-pohon dan membersihkan lahan yang masih berupa semak belukar, meski hanya menggunakan alat-alat seadanya. Masyarakat “bergotong

royong” membuka lahan, secara serentak dan dilakukan dalam jangka waktu 3 - 4 minggu. Permasalahan mulai muncul saat masyarakat menuntut pembayaran harian (kondisi ini telah menjadi “ciri” masyarakat Agimuga), dimana pengerjaan pembukaan lahan dipandang sebagai pekerjaan “proyek” yang memiliki nilai uang meski kegiatan tersebut untuk kepentingan mereka. Untuk pembukaan lahan tersebut, LPMK, telah menganggarkan dan langsung membayarkannya kepada kelompok/kampung yang telah selesai membuka lahan.

Bagi kelompok/masyarakat Kp. Killiarma tentang perubahan/pindahnya lokasi kandang yang telah selesai dikerjakan menjadi ganjalan mendalam. Masyarakat merasa tidak dihargai jerih payahnya, sementara alasan tidak layaknnya lahan yang telah disiapkan tidak dijelaskan. Upah kerja penyiapan lahan hingga saat ini belum diberikan dan sekarang diminta untuk segera menyiapkan lahan baru.

Untuk pemindahan lokasi peternakan pada prinsipnya masyarakat siap melakukan setelah upah kerja diberikan kepada masyarakat, bahkan masyarakat sudah membuat surat pernyataan tentang pemindahan lokasi kepada LPMK agar tidak muncul permasalahan baru lagi.

Permasalahan yang muncul di Kp. Killiarma nampaknya perlu disikapi secara arif oleh LPMK maupun Dinas Peternakan, Tanaman Pangan dan Perkebunan.

Terkait waktu pengiriman sapi yang direncanakan bulan Oktober atau November, tentunya pembangunan kandang harus segera dilakukan. Pembangunan kandang harus permanen (bukan asal jadi). Pengiriman bahan pembuatan kandang ternak yang ditunda-tunda akan menghambat

kegiatan kelompok/masyarakat.

Kondisi demikian yang harus disikapi oleh masyarakat dan mendapat perhatian dari pelaksana program agar program pemberdayaan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

2) Pelaksanaan Program Tanaman Pangan.

Sosialisasi kepada masyarakat oleh petugas dari Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, tentang program tanaman pangan nampaknya cenderung sangat terbatas dan tertutup bahkan hanya kepada beberapa orang di Kampung Amungun. Masyarakat Kp. Amungun diminta untuk membuka lahan untuk bercocok tanam. Pembukaan lahan dibutuhkan karena akan dipersiapkan untuk bercocok tanam jenis tanaman ubi, betatas, keladi masing-masing 1 Ha. Pembukaan lahan hanya dilakukan oleh beberapa warga masyarakat Kp. Amungun, dan ternyata mereka tahunya hanya disuruh bekerja untuk membuka lahan.

Kegiatan tersebut nyatanya telah menimbulkan masalah terkait dengan lokasi lahan yang berada di kampung lain (Kiliarma). Kondisi demikian terjadi karena menurut penuturan warga masyarakat di dua kampung lainnya tidak pernah mendapatkan penjelasan dari Kantor Ketahanan Pangan sebagai penanggungjawab program.

Disisi lain menurut pengakuan penanggungjawab program adalah bahwa lahan tersebut baru tahap awal yang pada tahun anggaran berikutnya lahan tersebut akan diperluas. Tujuan akhirnya adalah menjadi Pusat Lahan Ketahanan Pangan yang akan melibatkan petani dari kampung lain di wilayah Distrik Agimuga. Tentu saja kondisi demikian menjadi permasalahan tersendiri bagi warga Kiliarma, karena

mereka tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.

Terlepas dari segala problema yang ada dalam masyarakat, persiapan lahan tanaman pangan kini telah siap lahan seluas 2 Ha, selebihnya masih terus dilakukan penyelesaian. Untuk lahan yang telah siap tanam, kini masyarakat telah menanam bibit ubi, betatas dan pisang.

3) Pelaksanaan Program Koperasi

Dalam rangka penguatan kelembagaan koperasi sebagaimana yang direncanakan Dinas Koperindag, pada Juni 2012 telah dilakukan kegiatan penguatan kelembagaan koperasi sebagai berikut:

- a) Memotivasi masyarakat tentang pentingnya koperasi bagi masyarakat.

Pelatihan manajemen koperasi dan pembukuan koperasi. Kegiatan ini dilakukan 1 hari di Balai Kampung Kiliarma, yang diikuti oleh perwakilan masyarakat dari tiga kampung (Kp. Aramsolki, Kp. Amungun dan Kp. Killiarma)

- b) Pembentukan/restrukturisasi kelompok koperasi yang telah ada sebelumnya.
- c) Pemberian stimulan usaha koperasi Rp. 2.000.000,-/orang, diberikan kepada warga masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut. Pemberian bantuan stimulan ini dimaksudkan agar warga masyarakat bisa memiliki modal usaha dan berkelompok dalam kegiatan koperasi.

Menurut pendapat masyarakat pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan koperasi, tidak direncanakan secara baik bersama masyarakat. Peserta kegiatan kurang melibatkan unsur perempuan/ibu-ibu, padahal yang lebih ulet dan lebih dapat dipercaya untuk mengelola

koperasi pada umumnya adalah ibu-ibu. Selain itu dalam prakteknya kegiatan penguatan kelembagaan koperasi kurang direncanakan secara matang dan kurang melibatkan peran masyarakat setempat, sehingga tidak banyak warga yang mengetahui program ini. Salah satu wujud kurangnya perencanaan kegiatan adalah bahwa terdapat beberapa peserta kegiatan (dari dusun yang jauh dari tempat kegiatan), keikutsertaannya pada kegiatan tersebut justru karena kebetulan saat itu dia sedang berada disekitar tempat pertemuan.

Stimulan yang diberikan kepada perorangan peserta/masyarakat akhirnya dipahami oleh peserta yang bersangkutan adalah untuk kepentingan pribadi. Jumlah bantuan/stimulan sebesar Rp. 2.000.000,- yang diberikan kepada masing-masing warga jumlahnya dipotong secara berbeda-beda, mulai dari Rp.100.000,- sampai Rp. 500.000,-, dengan alasan untuk pembelian barang-barang koperasi. Tidak adanya pembentukan kelompok, dan tidak meratanya penerima bantuan modal usaha, serta sistem pemberian bantuan tanpa kesepakatan dengan warga masyarakat telah menimbulkan “benih-benih” kecemburuan sosial antar warga masyarakat dan ketidakpercayaan pada program pemerintah.

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi penguatan kapasitas/pemberdayaan

1) Faktor pendukung

- a) Respon positif Pemda Kabupaten Mimika (dalam hal ini beberapa SKPD terkait) dalam pelaksanaan pemberdayaan secara terpadu.
- b) Potensi alam yang tersedia terkait dengan penguatan kapasitas masyarakat dalam ketahanan pangan.
- c) Alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat dari

LPMK khususnya terhadap masyarakat suku Amungme – Kamoro.

2) Faktor penghambat

- a) Sulitnya akses transportasi dari dan ke lokasi pemberdayaan.
- b) Persepsi masyarakat yang kurang tepat terhadap upaya pemberdayaan, dimana setiap aktivitas yang dilakukan dalam pemberdayaan harus diimbangi dengan upah kerja.
- c) Belum efektifnya pendampingan dalam setiap pelaksanaan program.

e. Analisa Masalah

Permasalahan mendasar masyarakat Agimuga yang mendiami wilayah pegunungan adalah sulitnya akses ekonomi, transportasi dan pasar. Masyarakat sangat kesulitan untuk mendapatkan barang kebutuhan hidup (sembako). Memang sudah sejak tahun 2009 distrik Agimuga menerima berbagai program pembangunan, baik dari Pemda maupun Lembaga Swadaya Masyarakat, terutama fokus pada program ketahanan pangan dan peningkatan mutu gizi masyarakatnya. Peningkatan produksi dan pengembangan tanaman pangan lokal seperti sagu, ubi jalar dan betatas (keladi) menjadi sasaran utama program. Namun tampaknya program bergulir secara parsial, yang tidak terkoordinir secara baik, sehingga hasil yang diharapkan tidak cukup optimal. Upaya penguatan kapasitas masyarakat terutama melalui koordinasi berbagai program yang masuk ke wilayah Agimuga, menjadi sentral kegiatan penelitian ini.

Penguatan kapasitas masyarakat dalam ketahanan pangan, yang mengandung makna adanya unsur pemberdayaan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian serta peran aktif masyarakat, dalam pembahasannya perlu penjabaran lebih rinci

pada pelaksanaan program terkait. Dalam hal ketahanan pangan masyarakat saat ini baru pada tahap ketersediaan, belum sampai pada distribusi dan konsumsi.

Untuk mewujudkan ketersediaan pangan di masyarakat maka berbagai program dari SKPD terkait dengan kegiatan ekonomi sangat penting bersinergi sehingga tujuan pemberdayaan dapat dengan mudah dicapai. Program pembangunan dari Dinas Peternakan, Tanaman Pangan dan Perkebunan, Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Koperindag, telah diupayakan untuk bersinergi melalui dialog program maupun mekanisme pelaksanaan kegiatan. Tujuan dari pertemuan tersebut untuk mensinergikan berbagai program pembangunan di Distrik Agimuga agar tujuan dari program dimaksud menjadi riil dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pertemuan dan dialog antar instansi terkait telah memunculkan pentingnya peran pendamping di lapangan. Namun jika dihubungkan dengan kondisi internal Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan yang membawahi tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL), mengalami permasalahan tersendiri. Keberadaan tenaga penyuluh di kantor tersebut, terutama dengan tidak masuknya tuisi tenaga Penyuluh dalam SOTK baru, secara tidak langsung berdampak pada penyelenggaraan program pendampingan di masyarakat.

Jika mengurutkan dari permasalahan yang dihadapi oleh semua bidang program ekonomi, maka belum seluruh program dapat terwujud.

Pemberdayaan masyarakat pada program Peternakan, Tanaman Pangan dan Koperasi telah melaksanakan kegiatan programnya di Distrik Agimuga secara simultan. Mengamati dinamika dilapangan,

kegiatan program peternakan nampak cukup menonjol dibandingkan program lainnya. Kondisi demikian tidak terlepas dari peran LPMK, Akademisi (UNIPA) dan Dinas Peternakan sebagai pemangku kebijakan.

Keterlibatan masyarakat Distrik Agimuga (peternak) sebagai konsumen; Dinas Peternakan sebagai unsur pemerintah, LPMK sebagai unsur lembaga swadaya masyarakat dan UNIPA sebagai unsur akademisi, sebenarnya menjadi unsur penting dalam pemberdayaan masyarakat. Realisasi di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan peternakan sapi untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, dalam prosesnya masih ditemukan berbagai kendala. Kendala dimaksud antara lain adalah terkait dengan pembukaan lahan peternakan yang memiliki nilai “upah kerja” bagi anggota kelompok yang mengerjakannya menjadi kendala tersendiri, meskipun kegiatan tersebut untuk kepentingan masyarakat sendiri. Budaya mendapat upah setelah melakukan kegiatan, secara tidak langsung telah mengurangi nilai kemandirian yang akan dicapai dalam proses pemberdayaan. Disisi lain menurut pengurus kelompok dan pemangku kebijakan dikatakan bahwa program pemberdayaan masyarakat tidak berjalan apabila kepada mereka tidak diberikan upah kerja sebagai pengganti waktu mereka yang digunakan untuk persiapan kegiatan.

Program Dinas Koperindag, dalam hal Penguatan Kelembagaan Koperasi direalisasikan melalui kegiatan bantuan/stimulan modal usaha bagi anggota masyarakat (kurang lebih terhadap 100 warga), masing-masing diberikan sebesar Rp. 2.000.000,-. Pada kenyataannya kegiatan ini seperti “bagi-bagi” uang secara gratis, tanpa ada prasyarat yang akan mengikat

masyarakat penerima untuk pengembangan modal usaha. Mekanisme pembagian bantuan/stimulan melalui kelompok, sama sekali tidak dilakukan, bahkan sosialisasi hanya dilakukan sekedar saja sebelum pendistribusian bantuan/stimulan. Penguatan kelembagaan bagi pengurus dan anggotakoperasi yang telah ada sebelumnya kurang mendapatkan perhatian, sehingga pemberian bantuan/stimulan tersebut tidak memiliki makna untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut yakni tidak adanya anggaran untuk monitoring, yang akhirnya menghambat dalam penguatan ekonomi, termasuk kemajuan maupun perkembangan bantuan/stimulan sulit diketahui.

Realisasi dari program tanaman pangan, peternakan sapi dan koperasi pada dasarnya sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam ketahanan pangan. Permasalahannya adalah: a) mekanisme pelaksanaan program yang kurang utuh dalam bersinergi, b) kurangnya penjelasan tentang program kepada masyarakat yang berdampak pada keterlibatan dan peran aktif masyarakat, c) tidak adanya petugas/PPL yang kontinyu mendampingi masyarakat pada persiapan dan pelaksanaan program menjadi permasalahan tersendiri. Belum lagi budaya “upah dalam bekerja” memberi kesan bahwa masyarakat akan terlibat pada kegiatan jika ada upah, sehingga masyarakat bergerak bukan atas kehendak sendiri sebagaimana prinsip pemberdayaan masyarakat. Unsur lainnya adalah tidak kondusifnya pemerintahan distrik, dimana ketidakberadaan Kepala Distrik/Camat dan sebagian besar aparatnya yang diharapkan menjadi motivator, koordinator kegiatan

warga masyarakat dalam melaksanakan kegiatan, juga memunculkan permasalahan diantara warga masyarakat, bahkan “konflik” antar kampung. Meskipun demikian dilapangan masih nampak bahwa terdapat masyarakat yang cukup responsif terhadap program pembangunan dan ada yang masabodoh/acuh terhadap program yang diluncurkan di Distrik Agimuga. Kondisi demikian sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh pelaksana program apabila program pembangunan tersebut berlangsung secara intensif.

Pembelajaran dari program-program yang telah dilakukan di Distrik Agimuga selama ini, menunjukkan bahwa semua program tidak berlanjut bahkan ada diantaranya hanya sampai pada wacana. Kendala lainnya adalah kurangnya pendampingan, rendahnya etos kerja masyarakat maupun aparat pemerintah distrik, terbatasnya infrastruktur terutama pada transportasi menuju dan dari Distrik Agimuga, ketergantungan masyarakat kepada pihak lain yang secara tidak langsung berpengaruh pada upaya-upaya pembangunan di Distrik Agimuga. Meskipun sosialisasi program sudah dilakukan dan proses pelatihan telah termasuk didalamnya, persoalannya adalah berbagai program pembangunan pada umumnya hanya berlangsung satu tahun anggaran, kemudian terputus tanpa berkelanjutan serta tanpa adanya monitoring kegiatan. Kondisi ini secara tidak langsung berakibat pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pelaksana program dan dampaknya bagi pemilik program jika hendak memulai program yang baru membutuhkan banyak “energi”, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat tersebut.

Dinamika masyarakat yang selalu “bergejolak” dalam menerima program, dianggap hal biasa oleh Pemerintah setempat. Hal ini menyulitkan jika prinsip keberpihakan pada masyarakat ingin tetap terjaga. Pemerintah dalam hal ini sebagai pelaksana program pembangunan harus konsisten dan kegiatan terus berlangsung secara berkesinambungan, jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kendala pada pelaksanaan program di masyarakat tertinggal melalui kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dalam ketahanan pangan yang sarat dengan makna pemberdayaan, belum sepenuhnya terwujud. Meski telah diupayakan melalui sinergitas antar program instansi terkait, namun jika prinsip keberpihakan pada masyarakat tidak muncul, maka program yang dilaksanakan menjadi sia-sia.

Keberpihakan pemerintah pada pemberdayaan masyarakat di Agimuga belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terlihat dari program yang dipaksakan harus masuk tanpa perencanaan dan persiapan yang matang, karena tidak didukung anggaran yang memadai.

Minimnya pelayanan prasarana publik bidang transportasi, perhubungan, telekomunikasi sangat berpengaruh terhadap distribusi barang konsumsi maupun berbagai kelengkapan sarana prasarana lainnya. Kondisi ini berdampak pada realisasi program termasuk kehadiran aparat pemerintah pada umumnya dan khususnya para pendamping yang berguna untuk pengembangan teknologi pangan.

Oleh karena itu untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam ketahanan pangan, meski hanya untuk mencapai tahap ketersediaan pangan di masyarakat, diperlukan upaya yang intensif dan

berkesinambungan diantara program-program bidang ekonomi maupun sosial termasuk sinergitas diantara program instansi terkait.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan pembangunan di daerah tertinggal yang bertumpu pada upaya peningkatan kapasitas masyarakat untuk mencapai kecukupan kebutuhan kesejahteraan hidup diperlukan pendekatan multi dimensi yang berorientasi pada potensi lokal. Pola hidup yang terbangun dari unsur budaya, adat dan karakter komunitas sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilakunya dalam merespon pemenuhan kebutuhan hidup baik lahir maupun bathin. Kesejahteraan hidup masyarakat yang dapat ditempuh melalui upaya pemberdayaan diri maupun komunitas tidak serta merta dipahami sebagai langkah menuju perubahan.

Terkait dengan upaya penguatan kapasitas masyarakat dalam hal ketahanan pangan yang dimaksudkan untuk mewujudkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan keluarga dari waktu ke waktu, khususnya bagi masyarakat di daerah tertinggal ternyata masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa hal itu sangat bermanfaat bagi diri dan keluarganya, sehingga pola mereka cenderung berpikir apa yang diperoleh saat itu dan mendahulukan ketergantungan. Kondisi demikian muncul karena masyarakat masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sesaat, belum berorientasi pada perkembangan masa mendatang.

Penguatan kapasitas masyarakat dalam hal ketahanan pangan yang dilakukan secara terpadu dengan beberapa elemen terkait, di Distrik Agimuga ini dalam proses

nampak belum mendapat respon yang menguntungkan dari masyarakat sendiri. Hal ini dikarenakan berbagai faktor antara lain: kurangnya pemahaman terhadap program; kurangnya kontinuitas bimbingan dan pendampingan selama proses dan pasca kegiatan; kurangnya motivasi; kurangnya peran aparat setempat terhadap program dan kurangnya keberpihakan dari berbagai sumber terhadap komunitas di daerah tertinggal.

Rekomendasi

Berdasarkan kondisi yang ada dalam masyarakat, terkait dengan pemberdayaan masyarakat menuju ketahanan pangan kiranya perlu diperhatikan:

1. Dalam hal persiapan dan pelaksanaan program, para pelaku/pemangku program hendaknya melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Mensosialisasikan program kepada pihak terkait terutama kepada sasaran program, secara intensif, jelas, terbuka dan tidak terburu-buru hingga masyarakat benar-benar memahami program.
 - b) Memberikan bimbingan dan pendampingan secara langsung, kontinyu dan komitmen terhadap program dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi ekonomi masyarakat.
2. Menciptakan harmoni pelaksanaan program dilapangan, dengan meningkatkan intensitas koordinasi pelaksanaan program antar pihak di lapangan secara berkesinambungan.
3. Petugas Teknis/Penyuluh dari berbagai pihak terkait perlu berada/bertempat tinggal di lokasi, sehingga dapat membimbing dan bersama-sama dengan masyarakat melakukan setiap kegiatan.

4. Mengutamakan karakteristik dan kearifan lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan setiap program.
5. Sinergi pelaksanaan program pembangunan dari berbagai instansi/SKPD terkait perlu terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afadlal (ed), (2003). *Dinamika Birokrasi Lokal Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI.
- Agus Budi Purwanto, (2011). “*Perkembangan Masyarakat Daerah Tertinggal: Studi Kasus Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika, Papua*,” dalam *Masalah, Kebutuhan dan Sumber Daya Di Daerah Tertinggal: Studi Kasus di Sepuluh Kabupaten Tertinggal*.
- Agus M Tauchid S, Ir., M.Si, *Peningkatan Kualitas SDM Dalam Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat*, www.deptan.go.id/daerah_new/banten/
- Anwar Syarif, 2010. *Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Manusia*, <http://www.deptan.go.id/>
- Brata Kusuma, Deddy Supriadi, (2001). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Gunawan Sumodiningrat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. www.docstoc.com/docs/
- Kaho, Josef Rihu, (2000). *Prospek Otonomi Daerah di Negara kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, Abdul Gaffar (ed), (2003). *Kompleksitas persoalan Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Jurusan Ilmu Pemerintah UGM.
- Nawawi, Hadari, (1990). *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Suharto, Edi, (1997). *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS
- , (2004), “*Social Welfare Problems and Social Work in Indonesia: Trends and Issues*” (*Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial di Indonesia: Kecenderungan dan Isu*), makalah yang disampaikan pada International Seminar on Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 2 Maret
- Tv One Newsticker, Minggu, 16 September 2012. *Kabar Ekonomi: 13 Persen Penduduk Indonesia Rawan Pangan*.